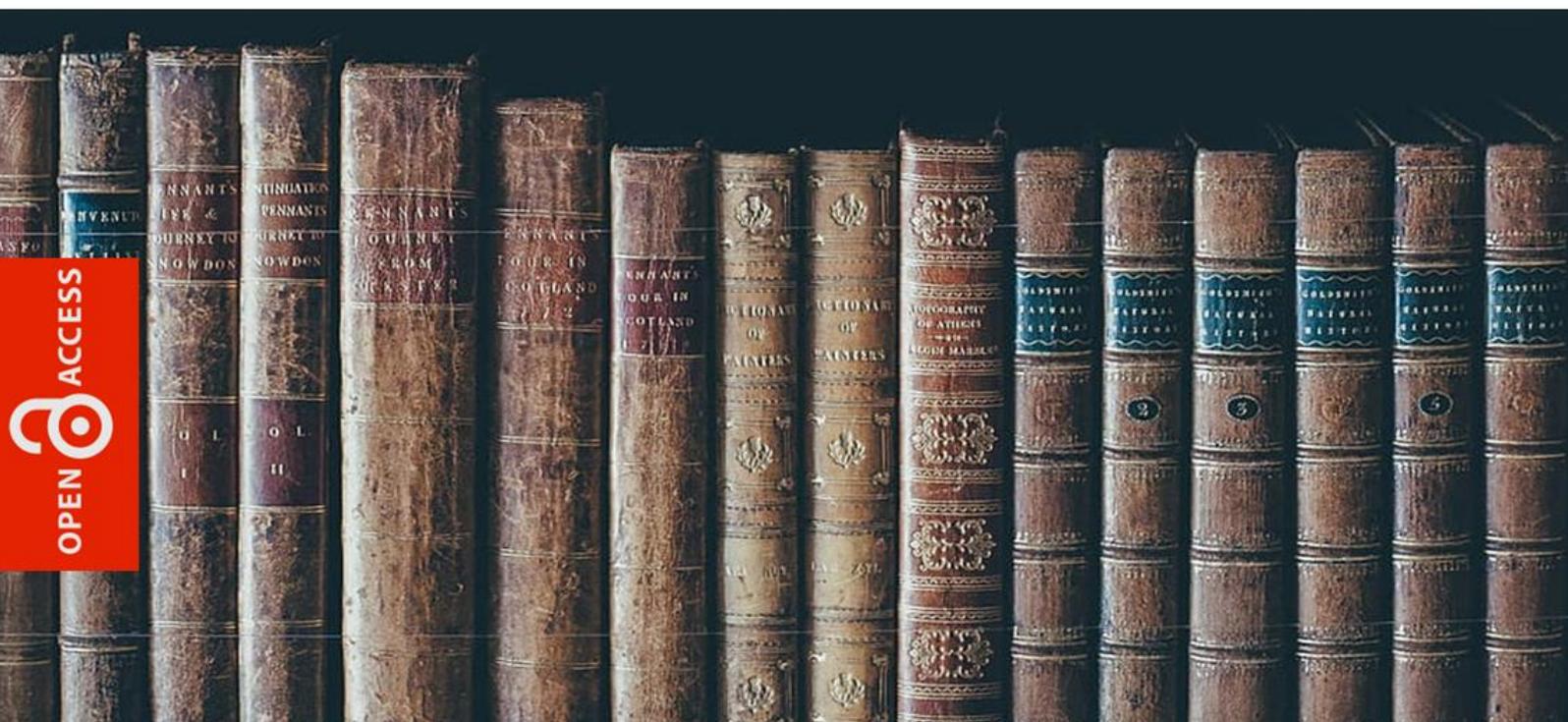




*Volume 3, Issue 2, Januari 2022*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta © 2022.** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Volume 3, Issue 2, Januari 2022*

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Ade Kurniawan	Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini	59-67
Rosa Mual	Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	68-77
Bruri Marwano Wutwensa	Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?	78-89
Halima Hamzah	Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar	90-100

### TINJAUAN LITERATUR

Ramdlon Mahuraden Tuakia	Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	101-110
--------------------------	--	---------

### RESENSI BUKU

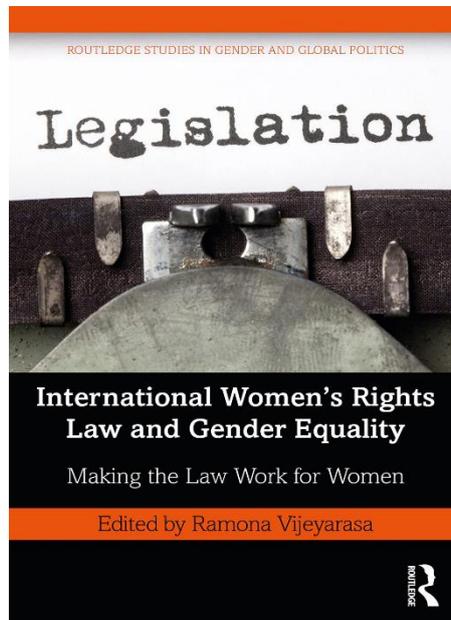
Hidayatul Fajriyah	International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1	111-112
--------------------	---	---------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.155



Judul Buku	: International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1 <sup>st</sup> Edition
Editor	: Ramona Vijayarasa
Tahun Terbit	: 2021
Halaman	: 260
Penerbit	: Routledge
ISBN	: 978-036-75494-1-1
Peninjau Buku	: Hidayatul Fajriyah
Afiliasi	: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email	: <a href="mailto:hidayahfajriyah@gmail.com">hidayahfajriyah@gmail.com</a>

## Book Review

Ramona Vijayarasa adalah seorang pakar internasional terkait isu kesetaraan gender. Beliau adalah Dosen Senior di Fakultas Hukum *University of Technology Sydney*, Australia. Berbagai penelitiannya telah membantu menghasilkan teori dan praktik terkait persoalan migrasi dan perdagangan manusia, hak asasi manusia dan hak-hak perempuan internasional. Ramona merupakan Kepala Investigator pada Lembaga *The Gender Legislative Index*, suatu sarana yang digunakan untuk memberi pemeringkatan dan penilaian terhadap suatu perundang-undangan khususnya terkait perosalan kesetaraan gender. Dia merupakan sorang penulis buku akademis *best-seller* berjudul *Sex, Slavery and the Trafficked Woman: Myths and Misconceptions about Trafficking and its Victims* (2015) dan sebagian besar publikasi media umum, akademis, dan kebijakan tentang masalah hukum dan gender. Ramona telah memperoleh sejumlah penghargaan dan hibah, termasuk dari Akademi Ilmu Sosial Australia (2020–2021) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (2020–2022). Dia merupakan Rekan Riset *Women's Leadership Institute of Australia* 2020. Sebelum bergabung dengan

dunia akademis, Ramona menduduki beberapa posisi terkait hak-hak perempuan di organisasi internasional, dan LSM lokal dan internasional.

Hukum merupakan sarana alat yang umum digunakan dalam memerangi ketimpangan gender, tetapi hukum yang mana yang benar-benar mengedepankan hak-hak perempuan? Buku ini berupaya membuka nuansa kompleks di balik hukum nasional yang responsif terhadap kesetaraan gender, dari beberapa pakar terkemuka dunia tentang kesetaraan gender. Dengan mengacu pada contoh-contoh hukum nasional dan internasional, buku ini memberikan teori yang *fundamental* di samping solusi nyata dan praktis untuk memenuhi janji hukum untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Buku ini terdiri dari empat bagian yang mencakup 13 bab. Bagian I menguraikan kemajuan apa yang telah dicapai hingga saat ini dalam pemberantasan ketimpangan gender, dan wawasan tentang potensi hukum sebagai salah satu pengungkit dalam perjuangan global untuk mewujudkan kesetaraan. Bagian II dan III dilanjutkan dengan pembahasan untuk mengeksplorasi bidang hukum yang konkret, dengan studi kasus dari berbagai yurisdiksi yang mengkaji seberapa baik undang-undang nasional yang mampu menjunjung harkat dan martabat perempuan. Para penulis membawa lensa kritis mereka ke dalam bidang hukum yang sering dipertimbangkan dari perspektif gender (kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi perempuan, tenaga kerja dan kesetaraan gender), bersamaan dengan membawa analisis yang sangat dibutuhkan untuk isu-isu yang sering diabaikan dalam perdebatan gender, seperti perpajakan, keadilan lingkungan dan pemerintahan yang baik. Bagian IV berusaha untuk beralih dari tujuan teoritis akuntabilitas yang lebih besar ke tujuan praktis. Hal ini mampu mengeksplorasi aspek akuntabilitas norma-norma hak-hak perempuan internasional di tingkat domestik dan potensi pendekatan feminis untuk undang-undang dalam menciptakan undang-undang yang mampu menjunjung harkat dan martabat perempuan.

Para kritik feminis hukum tidak sekuat terhadap klaim netralitas hukum selama beberapa dekade terakhir. Sementara kritik ini semakin memuncak, upaya merancang undang-undang dalam rangka mempertimbangkan gender justru kurang mendapat perhatian. Tidak ada negara di dunia yang sepenuhnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam penerapan hukum dan praktik. Kita tidak hanya menyaksikan berbagai kemunduran atas hak-hak perempuan di beberapa tempat di dunia, tetapi risiko kemunduran yang sengaja dirancang secara global terkait kesetaraan gender menjadi semakin jelas. Kompilasi bab-bab dengan menghadirkan wawasan luas tentang beragam aspek kehidupan perempuan dan hukum akan menjadi sumber daya dan sarana penting bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan para aktivis setelah adanya krisis kesehatan dan ekonomi global abad ini yang saat ini dihadapkan pada tugas yang mengawatirkan tetapi kritis untuk membangun masa depan yang adil dan merata untuk semua berdasarkan visi transformatif hak asasi perempuan.

Buku ini menawarkan wawasan yang kaya tentang kompleksitas kehidupan perempuan secara serius dalam desain legislatif di berbagai bidang hukum. Hal positifnya adalah bahwa hukum dapat menjadi sarana penting untuk perubahan sosial, beserta panduan praktisnya. Selain itu, buku ini sangat layak sebagai bahan bacaan mahasiswa, akademisi, legislator dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam hukum hak-hak perempuan internasional, kesetaraan gender, akuntabilitas pemerintah dan teori hukum feminis, buku ini memiliki potensi transformatif yang luar biasa untuk mendorong perubahan hukum menuju penghapusan ketimpangan gender.